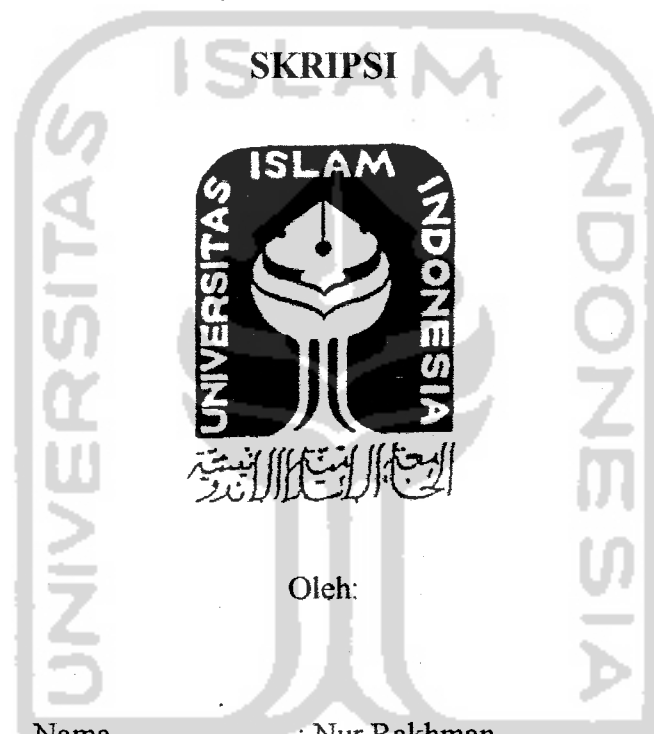


**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 1990-2004**



Oleh:

Nama : Nur Rakhman

Nomor Mahasiswa : 01313110

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2007

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 1990-2004**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Nur Rakhman

Nomor Mahasiswa : 01313110

Program Studi : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2007**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.



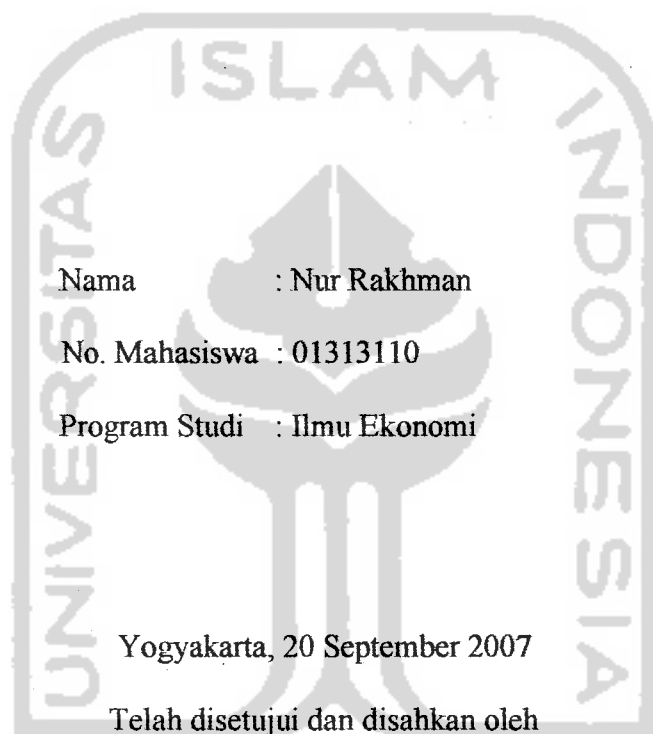
Yogyakarta, 20 September 2007

Penulis,

Nur Rakhman

PENGESAHAN

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 1990-2004**



Nama : Nur Rakhman

No. Mahasiswa : 01313110

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 20 September 2007

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Widarjono'. The signature is written in a cursive, flowing style.

Drs. Agus Widarjono, MA

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten
Cilacap Tahun 1990-2004**

**Disusun Oleh: NUR RAKHMAN
Nomor mahasiswa: 01313110**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS
Pada tanggal : 1 Oktober 2007

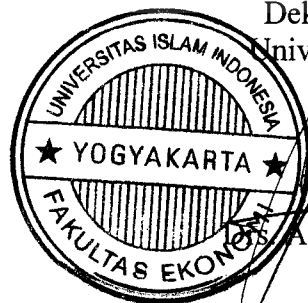
Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Agus Widarjono, MA

Penguji I : Dra. Diana Wijayanti, M.Si

Penguji II : Dra. Ari Rudatin, M.Si

Agus Widarjono
Diana Wijayanti
Ari Rudatin
.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Asmai Ishak
Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D



Halaman Motto:

**Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal
(Q.S. Ali-Imran: 190)**



Halaman Persembahan:



Ku persembahkan skripsi ini
untuk kedua orang tuaku, adik-adikku
dan seseorang yang hadir di dalam hatiku
(terima kasih untuk dukunganmu sayang)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Kata itulah yang pantas penulis panjatkan, setelah menyelesaikan skripsi ini. Puji dan Syukur selayaknya dipanjatkan kepada Dzat yang selalu dan diharapkan hadir dalam diri. Hanya lewat kata-katalah, penulis bisa menggambarkan kecintaan kepada-Nya.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang di sekitar penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid., M.ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, bapak Drs. Asmai Ishak, M.Bus, P.h.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, bapak Drs. Jaka Sriyana, M.Si dan ibu Dra. Diana Wijayanti, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi, ibu Dra. Ari Rudatin, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik. Selanjutnya, terima kasih banyak kepada bapak Drs. Agus Widarjono, MA selaku Dosen Pembimbing yang sedemikian rupa di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan waktu untuk memberi bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terima kasih pula untuk dosen-dosen Fakultas Ekonomi, khususnya Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memperkenalkan penulis pada dunia ekonomi, agama, dan pengetahuan lainnya

Penghargaan dan terima kasih harus penulis sampaikan kepada kedua orangtua (Amih dan Abah tercinta) yang tak henti-hentinya selalu mendoakan anaknya, adik-adik tercinta (Ajis, Fuad, Lia, Imron), buat (Emah dan pak Hadi)

yang selalu menyayangi dan tak henti-hentinya memberi dukungan baik moril ataupun materil, buat mba Heni sekeluarga makasih ya dukungannya. *Khusus buat seseorang yang selalu ada di hati karna motivasimu penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.* Teman-teman penulis di Jurusan Ekonomi Pembangunan (EP) 2001 (Hafid, Wahyu, Arip Sarkem, Risa, sahrul, Mul, dan asepe) dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dengan merekalah penulis selalu berdiskusi dan belajar untuk lebih dewasa dalam pemikiran. Teman-teman di kontrakan Anggur 5 (Kasep, Ricky, Ari, Awank, Tombel, Tlembuk, Oscar, dan kang Didi) yang selalu memberikan semangat dan bantuan materil maupun immateril. Buat (kang Wawo, Etong, Agung, Edo, Lia, lina, dan Kemin) terima kasih atas bantuan dan kebaikan kalin. Bapak Reni selaku ketua Rt 19/64 yang selalu bertanya “kapan wisuda?”.

Tidak lupa penulis ucapan terima kasih kepada perpustakaan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan UII Pusat atas pinjaman buku-bukunya. Terima kasih banyak untuk BPS Cilacap yang sudah memberi data.

Hasil penelitian ini bukanlah merupakan sesuatu yang sempurna – bahkan jauh dari sempurna, tetapi semoga menjadi langkah awal bagi penulis khususnya dan para pecinta ekonomi pada umumnya untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya.

Yogyakarta, 20 September 2007

Penulis,

Nur Rakhman

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Halaman Kata Pengantar.....	vii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel.....	xii
Halaman Abstrak.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Manfaat dan Tujuan	7
1.4.1. Tujuan Penelitian	7
1.4.2. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.....	10
2.1. Luas Wilayah Kabupaten Cilacap	10
2.2. Kependudukan.....	12

2.3. Keadaan Perekonomian.....	12
2.3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	12
2.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	14
2.3.3. PDRB Per kapita	15
2.3.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
BAB III. KAJIAN PUSTAKA.....	17
BAB IV. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS.....	20
4.1. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	20
4.1.1. Pengelolaan Keusangan Daerah	21
4.1.2. Perimbangan Antara Pusat dan Daerah	24
4.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	25
4.3. Teori Pengeluaran Pemerintah	29
4.4. Variabel yang berpengaruh dalam pengeluaran daerah	33
4.4.1. Pendapatan Asli Daerah	33
4.4.2. PDRB per kapita	35
4.4.3. Jumlah Penduduk	36
4.5. Hipotesis Penelitian.....	39
BAB V. METODE PENELITIAN	40
5.1. Obyek Penelitian	40
5.2. Jenis dan Sumber Data	40
5.3. Analisis Model PAM.....	40
5.4. Definisi Variabel	43
5.5. Uji Statistik.....	44

5.5.1. Uji t	44
5.5.2. Uji f.....	45
5.6. Uji Koefisien Determinasi	47
5.6.1. Uji Asumsi Klasik	47
5.6.2. Uji Autokorelasi	47
5.6.3. Uji Heteroskedastisitas.....	49
5.6.4. Uji Multikolinieritas.....	50
BAB VI. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	53
6.1. Pemilihan Model Regresi.....	54
6.2. Hasil Estimasi Regresi.....	55
6.3. Uji Statistika.....	55
6.3.1. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t).....	56
6.3.2. Pengujian Secara Serempak (Uji F).....	56
6.3.3. Koefisien Determinasi (R^2).....	59
6.4. Uji Asumsi Klasik	59
6.4.1. Uji Autokorelasi	60
6.4.2. Uji Heteroskedastisitas.....	61
6.4.3. Uji Multikolinieritas.....	61
6.5. Interpretasi Ekonomi	62
BAB VII. SIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	64
7.1. Kesimpulan.....	64
7.2. Implikasi.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap	2
1.2. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap.....	4
1.3. Perkembangan PDRB Kabupaten Cilacap	5
2.1. Luas Wilayah, Banyak Desa dan Penduduk Kabupaten Cilacap	10
2.2. Perkembangan PD BPR “Bank Pasar” Sleman Tahun 1970-2005	11
2.3. Penduduk Kabupaten Cilacap Dirinci Menurut Jenis Kelamin Tahun 1999-2004	12
2.4. Penerimaan Kabupaten Cilacap Tahun 2002	13
2.5. Pengeluaran Kabupaten Cilacap Tahun 2002	14
2.6. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Cilacap Tahun 2000-2004...	15
4.2. Realisasi PAD Kabupaten Cilacap Tahun 1996-2004	16
6.1. Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model Linier	54
6.2. Hasil Estimasi Uji MWD untuk Model Log Linier.....	54
6.3. Hasil Estimasi Dengan Variabel Dependen LogY	55
6.4. Uji Autokorelasi	60
6.5. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	61
6.7. Hasil Uji Multikolinieritas	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya pembangunan nasional di Negara-negara berkembang memfokuskan pada pembangunan ekonomi dalam rangka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran produk domestik regional bruto (PDRB) pada tingkat nasional dan produk domestik regional bruto untuk daerah. Scumpeter tahun 1961 menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi menurutnya adalah suatu sumber kenaikan output.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu diperhatikan adalah mengusahakan seoptimal mungkin potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, mengingat potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda maka sebaiknya setiap daerah menentukan sendiri-sendiri potensi yang menjadi unggulan daerah tersebut. Peran pemerintah dalam upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi mulai dipandang sebagai hal yang penting ketika mekanisme pasar sebagai motor penggerak mengalami kegagalan.

Ada tiga macam faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, 1) akumulasi modal, 2) pertumbuhan penduduk, dan 3) kemajuan teknologi. Namun apakah selain ketiga faktor di atas tidak ada lagi faktor lain yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama apabila dihadapkan pada masalah pembangunan daerah.

Pengeluaran pemerintah daerah tingkat II yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi aparatur pemerintah dalam menuju perubahan pembangunan yang lebih baik kearah yang dicita-citakan, sesuai yang telah ditetapkan dalam APBD. Pencatatan ini dimaksud untuk memonitor kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan yang telah direncanakan serta sebagai pertimbangan untuk menyusun anggaran dimasa yang akan datang sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan diberbagai sektor.

Tabel 1.1
Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap
Tahun 1992-2004 (milyar rupiah)

Tahun	Pengeluaran rutin	Pengeluaran Pembangunan
1992	8.379.019	12.817.642
1993	10.458.248	14.655.159
1994	12.384.990	16.423.875
1995	14.306.105	20.628.518
1996	17.764.228	24.835.018
1997	36.093.115	30.040.017
1998	86.235.156	25.755.638
1999	118.459.945	50.743.370
2000	113.523.808	42.314.255
2001	282.742.494	69.811.920
2002	351.663.723	85.711.524
2003	166.919.390	378.594.690
2004	91.764.753	431.573.154

Sumber: Cilacap dalam angka tahun 1992-2004

Pada tahun Anggaran 2003 pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan mencapai Rp 545.514.080 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 108.138.833 dari total pengeluaran tahun sebelumnya. Dari jumlah pengeluaran

tersebut Rp 166.919.390 dikeluarkan untuk pembiayaan yang bersifat rutin dan Rp 378.594.690 dikeluarkan untuk pembiayaan yang bersifat pembangunan.

Sedangkan pada tahun 2004 pengeluaran pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp 22.176.173 dari pengeluaran tahun sebelumnya. Rp 91.764.753 untuk pembiayaan yang bersifat rutin dan Rp 431.573.154 untuk pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hanya pada tahun 2003-2004 pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap mengalami penurunan dari Rp 545.514.080 menjadi Rp 523.337.907 atau menurun sekitar Rp 22.176.173 ini menandakan bahwa keseriusan terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan mengalokasikan sumber dananya untuk kepentingan masyarakat umum.

Menyadari minimnya anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat guna memacu laju pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, maka selain ekstensifikasi upaya pengajuan program kepada pemerintah pusat yang lebih penting lagi adalah intensifikasi dan ekstensifikasi penggalan dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah, yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi-potensi yang ada di daerah.

Bantuan dana pembangunan dari pemerintah pusat yang selama ini diterima pemerintah daerah pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu program inpres Dati I yang bersifat umum dan bantuan yang bersifat khusus. Pada bantuan yang bersifat umum diberikan kewenangan yang

lebih besar kepada pemerintah propinsi untuk mengalokasikan penggunaannya, oleh pemerintah propinsi biasanya dialokasikan untuk membiayai pembangunan yang menjadi prioritas dan mengarah pada penekanan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Dan penggunaan bantuan yang bersifat khusus penggunaannya dialokasikan untuk membiayai kegiatan/program yang telah ditentukan oleh pusat seperti; dana reboisasi, peningkatan jalan propinsi, pembinaan masyarakat desa tertinggal dan lain sebagainya. Dana pembangunan ini dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja pembangunan. Sebagai gambaran besarnya anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Cilacap periode 1990-2004 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap
Tahun 1990-2004 (milyar rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
1990	11.997.363
1991	16.897.678
1992	21.017.503
1993	24.784.061
1994	27.834.239
1995	33.631.338
1996	42.599.246
1997	66.133.132
1998	111.990.794
1999	337.023.280
2000	155.838.063
2001	352.554.414
2002	429.723.629
2003	545.514.080
2004	523.337.907

Sumber: Cilacap dalam angka tahun 1990-2004

sasaran sehingga pertumbuhan ekonomi dalam suasana krisis tetap dapat terwujud. Salah satu sebab mengapa pengeluaran pemerintah daerah pengaruhnya begitu besar di dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah adalah dikarenakan pengeluaran pemerintah tersebut mencerminkan keinginan riil masyarakat, yang mengakibatkan alokasi pengeluaran pemerintah tersebut menjadi efektif dan efisien.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap tahun 1997 yang diperlihatkan dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 1993 sebesar 5,10 %. Apabila dihitung secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi selama periode 1993-1997 diperoleh angka rata-rata sebesar 8,09 % yang berarti pertumbuhan ekonomi pada tahun 1997 di bawah rata-rata karena pada tahun 1997 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,10 %. Angka ini jauh lebih kecil dari angka yang ingin dicapai dalam pelita VI yaitu sebesar 9,50 %.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan pengeluaran pemerintah dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Cilacap sangatlah penting.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap. Judul penelitian ini adalah **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 1990-2004”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Pokok permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap ?
2. Bagaimana pengaruh PAD terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap ?

1.3 Batasan Masalah

Pengeluaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah besarnya tingkat pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap dalam rangka membiayai pembangunan dimana dana pengeluaran tersebut tercakup dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Pengeluaran tersebut terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap.
- b. Menganalisis pengaruh PAD terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap.

- c. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis tentang pengeluaran pemerintah dalam APBD, khususnya faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan ekonomi terutama ekonomi pembangunan, sehingga dapat memperkaya penelitian sejenis yang telah ada dan juga bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Memuat penjelasan tentang obyek penelitian menyangkut kondisi Kabupaten Cilacap secara umum.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Berisikan uji pustaka terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Menjelaskan teori-teori yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

BAB V METODE PENELITIAN

Menjelaskan materi, alat, variabel, data dan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB VI ANALISIS DATA

Menyajikan hasil estimasi data melalui metodologi yang telah dijelaskan dalam BAB IV

BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Memuat kesimpulan dari penelitian ini setelah melakukan analisis pada BAB V dan memberikan sarana yang dianggap perlu.



BAB II

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

2.1. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Cilacap adalah 225.360,840 Ha termasuk pulau Nusakambangan seluas 11.510,552 Ha atau sekitar 6,94 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap dibagi menjadi 23 kecamatan dan 280 desa/kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Kawunganten (26.109,295 Ha). Sedangkan daerah yang memiliki wilayah luas yang terkecil adalah Kecamatan Cilacap Selatan (911.267 Ha). Kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Majenang (117,846 jiwa), sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Sampang (36.975 jiwa).

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Banyak Desa dan Penduduk
Kabupaten Cilacap, 2003 (jiwa)

Wilayah	Luas Wilayah	Banyaknya	
		Desa	Penduduk
Dayeuhluhur	18.506.183	14	47,311
Wanareja	19.059.629	16	92,253
Majenang	13.852.276	17	117,846
Cimanggu	16.744.111	15	94,990
Karangpucung	11.502.252	14	69,143
Cipari	12.127.053	11	63,980
Sidareja	5.424.000	10	56,872
Kedungreja	7.449.700	11	80,084
Patimuan	7.226.760	7	43,300
Gandrungmangu	14.318.584	14	100,268
Bantarsari	9.553.700	8	66,255
Kawunganten	26.109.295	12	92,897
Jeruklegi	9.930.294	13	58,320
Kesugihan	8.230.649	16	93,613
Adipala	6.118.683	16	79,519
Maos	2.804.293	10	46,908

Sampang	2.730.000	10	36,975
Kroya	5.883.603	17	101,896
Binangun	5.142.457	17	64,159
Nusawungu	6.126.350	17	76,103
Cilacap Selatan	911.267	5	76,776
Cilacap Tengah	2.215.219	5	83,264
Cilacap Utara	1.883.930	5	61,864
Jumlah	213.850.288	280	1.704.596

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap tahun 1990-2004

Untuk mempermudah kerja bupati dalam hal pengawasan dan koordinasi maka dalam menjalankan pemerintahannya bupati Cilacap dibantu oleh beberapa pembantu bupati yang masing-masing membawahi satu wilayah yang terdiri dari beberapa wilayah administrasi. Pada tabel berikut akan ditunjukkan tentang berbagai wilayah administrasi Kabupaten Cilacap.

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi
Kabupaten Cilacap

Wilayah	Wilayah Kecamatan	Desa/kelurahan
Majenang	Dayeuhluhur	14
	Wanareja	16
	Majenang	17
	Cimanggu	15
	Karangpucung	14
	Cipari	11
Sidareja	Sidareja	10
	Kedungreja	11
	Patimuan	7
	Gandrungmangu	14
	Bantarsari	8
	Kawunganten	12
Cilacap Kota	Jeruklegi	13
	Kesugihan	16
	Adipala	16
	Cilacap Tengah	5
	Cilacap Selatan	5
	Cilacap Utara	5
Kroya	Maos	10
	Sampang	10
	Kroya	17
	Binangun	17
	Nusawungu	17
	jumlah	280

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap tahun 1990-2004

2.2. Kependudukan

Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah 225.360,840 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 1.704.596 jiwa (tahun 2003) berikut rincian jumlah penduduk yang terbagi menurut jenis kelamin.

Tabel 2.3
Penduduk Kabupaten Cilacap dirinci menurut jenis kelamin
Tahun 1999-2004 (jiwa)

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan
1999	826.025	825.984	1.651.983	9.258
2000	835.386	836.393	1.671.779	19.796
2001	844.412	844.802	1.689.214	17.435
2002	848.246	848.519	1.696.765	7.551
2003	852.943	851.653	1.704.596	7.831
2004	855.838	854.070	1.709.908	5.312

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap tahun 1990-2004

2.3. Keadaan Perekonomian

2.3.1. Anggaran Penerimaan Dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang kondusif salah satu komponen yang diandalkan dan merupakan variabel yang signifikan adalah pengeluaran pemerintah yang berada dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah. Keberadaan anggaran pengeluaran pemerintah yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah, serta penerimaan lain, dana tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

Berikut ini tabel APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2002.

Tabel 2.4
Penerimaan kabupaten Cilacap
Tahun 2002(rupiah)

Penerimaan	Jumlah
A. Penerimaan Daerah	2.195.233.834
1. Bagia Sisa Perhitungan tahun Lalu	84.100.017
2. Pendapatan Asli Daerah	295.228.473
2.1. Pajak Daerah	132.049.028
2.2. Retribusi Daerah	138.816.903
2.3. Bagian Laba Usaha Milik Daerah	1.931.631
2.4. Penerimaan Laian-Lain	22.430.911
3. Bagia Dana Perimbangan	1.814.675.301
3.1. Bagi Hasil Pajak	158.227.227
3.2. Bagi Hasil Bukan Ajak	13.476.928
3.3. DAU	1.510.475.091
3.4. DAK	6.400.000
4. Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah	1.210.043
4.1. Pos Pinjaman Pemerintah Daerah	1.210.043
4.2. Pos Pinjaman dari Lembaga keuangan Dalam Negeri	-
5. Bagian Lain-Lain Penerimaan Yang Sah	-
5.1. Pos Dana Penyeimbang	-
5.2. Pos Penerimaan dari Propinsi	-
TOTAL	4.390.447.668

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap tahun 1990-2004

Tabel 2.5
Pengeluaran Kabupaten Cilacap
Tahun 2002(rupiah)

Pengeluaran	Jumlah
A. Pengeluaran Rutin	1.990.238.930
1. Belanja Pegawai	1.480.582.863
2. Belanja Barang dan Jasa	149.445.179
3. Belanja Perjalanan Dinas	24.893.252
4. Biaya Pemeliharaan	15.844.084
5. Belanja Lain-Lain	165.272.245
6. Angsuran Pinjaman	190.536.859
7. Bantuan Keuangan	243.142.691
8. Pengeluaran tidak termasuk bagian lain	10.107.181
9. Pengeluaran yang tidak disangka	30.414.576
B. Pengeluaran Pembangunan	390.637.797
1. Sektor Industri	1.538.732
2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	10.793.411
3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	2.100.102
4. Sektor Tenaga Kerja	2.571.809
5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah dan Koperasi	10.971.799
6. Sektor Transportai	128.963.805
7. Sektor Pertambangan dan Energi	4.014.518
8. Sektor Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	20.506.759
9. Sektor Pembangunan Daerah dan Transmigrasi	25.890.426
10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	17.440.874
11. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	43.832.853
12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	3.062.614
13. Sektor Kesehatan dan Kesejahteraan Social	27.726.367
14. Sektor Perumahan dan Pemukiman	14.506.940
15. Sektor Agama	6.356.725
16. Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	12.699.038
17. Sektor Hukum	780.046
18. Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	52.792.768
19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa	2.534.957
20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	1.553.254
TOTAL	2.380.876.727

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap tahun 1990-2004

2.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap pada tahun 2004 yang ditunjuk oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 1994 lebih tinggi dari tahu sebelumnya. Pertumbuhannya sebesar 169.574.517 atau 7.38 persen pertumbuhan riil sektoral tahun 2004 secara umum mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor listrik,

gas dan air bersih yang mencapai 34.21 persen dan pertumbuhan terendah terjadi pada sektor pertanian, jasa-jasa dan perdagangan, restoran dan hotel yaitu sebesar -0.22 persen, 1.31 persen, dan 2.68 persen. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi baik menurut harga konstan 1994 maupun harga berlaku disektor listrik, gas dan air bersih mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan baik ongkos produksi maupun harganya. Dari tabel di atas juga diketahui bahwa pada tahun 2004 menurut harga konstan 1994 seluruh sektor kecuali sektor pertanian, jasa-jasa dan perdagangan, restoran dan hotel mengalami pertumbuhan diatas total PDRB (5.10 %). Rendahnya pertumbuhan pada sektor pertanian disebabkan karena terjadinya kemarau yang panjang sehingga menyebabkan produksi pada lahan pertanian menurun. Sektor listrik, gas dan air bersih pertumbuhannya paling tinggi diantara semua sektor pembentuk PDRB kabupaten Cilacap yang mencapai 34.21 persen. Hal itu dikarenakan tingginya peningkatan rumah tangga pengguna listrik yang tentunya berimplikasi pada meningkatnya produksi listrik.

2.3.3. PDRB Perkapita

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pendapatan penduduk suatu daerah secara rata-rata dapat didekati dengan menggunakan angka PDRB perkapita. PDRB perkapita yaitu hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang sama.

Tabel 2.6
Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Cilacap
Tahun 2000-2004 (milyar rupiah)

Tahun	PDRB perkapita	Pertumbuhan (%)
2000	130.6333851	6.51
2001	135.7033141	5.17

2002	140.2340266	4.53
2003	144.6534601	4.42
2004	150.1341950	5.48

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap tahun 2000-2004

2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu modal dasar pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan ini diperoleh melalui penggalan sumber-sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. PAD yang semakin besar menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu menggali potensi daerahnya. Peningkatan perekonomian dapat dilihat dari peningkatan PAD dari tahun ke tahun. Pemerintah Kabupaten Cilacap selalu berupaya meningkatkan PAD melalui penggalan sumber-sumber dari berbagai sektor PAD yang dimiliki.

Tabel 2.7
Realisasi PAD di Kabupaten Cilacap
Tahun 1996-2004 (milyar rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan
1996	5.852.220	26.3 %
1997	9.566.869	63.5 %
1998	14.016.803	46.5 %
1999	26.179.521	86.8 %
2000	19.278.951	-26.3 %
2001	32.112.950	66.5 %
2002	34.527.492	6.9 %
2003	48.301.124	39.9 %
2004	42.800.527	-11.4 %

Sumber: BPS Kabupaten Cilacap tahun 1996-2004

Pendapatan suatu daerah sebaiknya memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Melihat pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap seperti tergambar dalam realisasi PAD kabupaten Cilacap tahun 1996-2004 mengalami perkembangan yang berfluktuasi dan bervariasi.

BAB III
KAJIAN PUSTAKA

3.1. Analisis Pengaruh Pengeluaran Rutin Dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap PDRB Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara Tahun 1991-2001

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim dalam penelitian tersebut variabel dependen yang digunakan adalah PDRB dan variabel independennya adalah pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Model persamaan yang dipakai adalah model regresi linier. Berdasarkan atas uji pengaruh pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terhadap PDRB Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara tahun 1991-2001, dari dua variabel ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pengeluaran rutin berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, artinya semakin besar pengeluaran rutin maka PDRB juga akan semakin besar dan hal ini sesuai dengan hipotesis.
- Pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, artinya semakin besar pengeluaran pembangunan maka PDRB juga akan semakin besar dan hal ini sesuai dengan hipotesis.
- Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, dan hal ini sesuai dengan hipotesis.

- Pengujian pelanggaran terhadap asumsi klasik yang dilakukan tidak ditemukan adanya autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

3.2 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Daerah Dalam APBD Di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1983-2002

Penelitian yang dilakukan oleh Andri Susanto dalam penelitian tersebut variabel dependen yang digunakan adalah pengeluaran daerah dan variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah, jumlah penduduk dan laju inflasi. Model persamaan yang dipakai adalah model regresi linier. Berdasarkan atas uji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran daerah dalam APBD di Kabupaten Sleman dari ketiga variabel dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran daerah di Kabupaten Sleman, artinya semakin besar PAD maka pengeluaran daerah juga akan semakin besar dan hal ini sesuai dengan hipotesis.
- Jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran daerah di Kabupaten Sleman, artinya semakin besar jumlah penduduk maka pengeluaran daerah akan semakin menurun dan ini tidak sesuai dengan hipotesis yang mengatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran daerah di Kabupaten Sleman. Hal ini bisa terjadi karena tingkat pertumbuhan penduduknya yang sangat tinggi akan menyebabkan jumlah angkatan kerja meningkat penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja tersebut akan berusaha mencari pekerjaan untuk memperoleh pendapatan. Namun karna

jumlah lapangan pekerjaan di Kabupaten Sleman tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, maka akan terjadi pengangguran. Kondisi ini akan terus berlangsung selama lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi seluruh permintaan penduduk yang ingin bekerja, akibatnya tingkat pengangguran dari tahun ke tahun akan semakin meningkat. Kondisi ini tentu akan menghambat pembangunan ekonomi, sehingga akan berpengaruh terhadap menurunnya pengeluaran daerah di Kabupaten Sleman.

- Laju inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran daerah di Kabupaten Sleman, artinya semakin besar laju inflasi maka pengeluaran daerah akan menurun dan hal ini sesuai dengan hipotesis.
- Pendapatan Asli Daerah, jumlah penduduk, dan laju inflasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran daerah di Kabupaten Sleman, dan hal ini sesuai dengan hipotesis.
- Pengujian terhadap koefisien determinan (R^2) yang dilakukan menghasilkan nilai yang tinggi sebesar 0.983561. hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen pengeluaran daerah sebesar 98.36% dan hanya 1.64% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model.
- Pengujian pelanggaran terhadap asumsi klasik yang dilakukan tidak ditemukan adanya autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan adanya keseragaman dan keselarasan prinsip-prinsip agar pembagian tugas dan wewenang masing-masing bagian bisa berjalan dengan lancar dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut telah dijelaskan dalam UU No. 5 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yaitu memperkokoh kesatuan dan kepentingan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.

1. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.
2. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi dengan memberi kemungkinan bagi pelaksanaan asas perbantuan.
3. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek kedemokrasian.
4. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan asas desentralisasi, maka wilayah negara kesatuan RI dibagi atas “daerah besar” dan “daerah kecil” yang bersifat otonom yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kotamadya). Daerah otonomi ini dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan serta syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Sebagai konsekwensi asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan dan kewenangan kepada daerah otonom, maka pemerintah pusat menyerahkan sebagian sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaannya, disamping pemberian sejumlah uang dalam bentuk subsidi dan sumbangan lainnya.

4.1.1. Pengelolaan keuangan daerah

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 menetapkan kepala daerah sebagai pemegang tanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerahnya, dari segi susunan organisasi, pengelolaan dan pengawasan. Tetapi dalam praktek, tugas-tugas ini sebagian besar diatur oleh peraturan pemerintah pusat, pengelolaan dan bentuk organisasi keuangan yang dipakai, sama di seluruh Indonesia. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Daerah antara pusat dan Daerah, pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan pada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah dengan berpedoman pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan umum keuangan daerah antara lain sebagai berikut : Dalam pengalokasian anggaran baik rutin maupun pembangunan senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip anggaran berimbang dan dinamis serta efisien dan efektif dalam peningkatan produktivitas.

1. Anggaran rutin diarahkan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintah dan pembangunan.
2. Anggaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan sektor-sektor secara berkesinambungan dalam mendukung penyempurnaan maupun perbaikan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan skala prioritas.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait dengan yang lain. Ketiga aspek tersebut meliputi : Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah

dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.

- a. Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dan suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
- b. Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintah terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pemerintah itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam pasal 23 ayat (5) UUD 1945, aspek pengelolaan keuangan daerah juga merupakan subsistem yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 78 sampai pasal 86. Dalam pasal 80 ditetapkan bahwa perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan UU. Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, penataan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut barang tentu pelaksanaan otonomi daerah hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana *instrumen*

atau pengelolaan keuangan daerah saat ini mampu memberi nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab sebagaimana yang telah diamanatkan oleh kedua UU tersebut.

4.1.2. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang ideal adalah apabila setiap tingkat dapat *independent* di bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat. Hal ini berarti subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama APBD, mulai berkurang kontribusinya dan yang menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri. Menurut E Koswara, ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Daerah otonom cenderung lebih mengandalkan kepada sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan pinjaman daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berada dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Dana perimbangan menurut UU No. 25 tahun 1999 secara garis besar dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu : Bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Penerimaan dari sumber daya alam.

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar suatu daerah untuk membiayai pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut UU No. 25 Tahun 1999 dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Kebutuhan khusus yang dimaksud adalah Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum.

4.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran dapat diartikan sebagai keuangan untuk suatu jangka waktu tertentu yang menyangkut baik neraca penerimaan maupun pengeluaran di masa yang akan datang. Sedangkan penyusunan anggaran negara termasuk dalam fungsi penerimaan administrasi negara. Fungsi administrasi disamping perencanaan adalah pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa APBD merupakan rencana keuangan dalam jangka waktu tertentu yang menyangkut baik neraca penerimaan dan pengeluaran. APBD adalah hal yang sangat penting karena APBD adalah suatu kebijakan yang meliputi :

- Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan.
- Merupakan suatu rencana untuk mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
- Memberi isi dan arti kepada tanggungjawab pemerintah daerah.
- Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil.
- Merupakan pemberian kuasa kepada gubernur, bupati, walikota untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada sosial masyarakat. Pemerintah daerah yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk menilai kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Tujuan dan APBD sebagaimana dengan anggaran negara mempunyai arti:

1. Suatu dasar kebijaksanaan menjalankan keuangan yang akan dilakukan oleh daerah untuk masa tertentu dengan memahami periode waktu tahun anggaran.

2. Suatu pemberian kuasa dari DPRD kepada badan pemerintah daerah sebagai badan eksekutif dengan batasan tertentu untuk melakukan pengeluaran sebagai akibat menjalankan pemerintahan.
3. Batas-batas pengawasan yang dilakukan oleh penguasa atasan terhadap daerah bawahannya sehingga dapat berjalan dengan baik.

APBD menggambarkan sisi pendapatan untuk mendorong sisi belanja, disusun setiap tahun anggaran berimbang. Belanja merupakan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan.

APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan. Pada sisi lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran daerah dibagi menjadi dua:

1. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset kekayaan bagi daerah. Pengeluaran rutin terdiri dari : belanja admimtrasi umum (belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan) dan belanja operasi dan pemeliharaan saran dan prasarana umum.

Anggaran rutin di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah daerah, memiliki peranan penting agar roda pemerintahan dapat berjalan. Artinya dengan tersedianya dana rutin akan dipergunakan untuk :

- a. Pembiayaan adminitrasi pemerintahan
- b. Pembiayaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum
- c. Pemeliharaan asset daerah
- d. Membiayai kegiatan opsional proyek-proyek pembangunan yang selesai dibangun
- e. meningkatkan tabungan pemerintah antara lain melalui penghematan pemakaian sumber-sumber kekayaan daerah.

2. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaanya. Pengeluaran pembangunan daerah terdiri dari :

- Belanja publik, belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik yang mempunyai nilai ekonomis lebih dalam satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan asset daerah.
- Belanja aparatur, belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur diperkirakan akan membenikan maanfaat pada periode berjalan dan periode yang akan datang.

4.3. Teori Pengeluaran Pemerintah

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G - X + M$, merupakan “sumber legitimasi” pandangan kaum *Keynesian* akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi yang sangat sederhana tersebut dengan gamblang dapat ditelaah bahwa kenaikan (penurunan) pengeluaran pemerintah akan menaikkan (menurunkan) pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antar yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta.

Temuan kemudian oleh *Richard A. Musgrave* dinamakan “hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat” (*law of growing public expenditure*). *Wagner* sendiri menamakainya “hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat” (*law of ever increasing state activity*). Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi:

$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} > \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

GpC : pengeluaran pemerintah per kapita

YpC : produk atau pendapatan nasional per kapita

t : indeks waktu

Menurut Wagner hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab yang dimaksud adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; perkembangan demokrasi; dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan.

WW Rostow dan *RA Musgrave* menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka, rasio investasi pemerintah terhadap investasi total dengan perkataan lain juga rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal itu disebabkan karena pada tahap awal ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Bersamaan dengan itu porsi investasi pihak swasta juga meningkat. Tetap besarnya peranan pemerintah adalah karena pada tahap ini banyak terjadi kegagalan pasar yang ditimbulkan oleh perkembangan ekonomi itu sendiri. Banyak terjadi kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan, yang menuntut pemerintah untuk turun tangan mengatasinya.

Dalam suatu proses pembangunan, menurut *Musgrave*, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah

terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Rostow dan Musgrave, seperti halnya Wagner, melandasi pendapatnya juga berdasarkan pengamatan terhadap pengalaman pembangunan ekonomi di banyak Negara.

Peacock dan Wiseman mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Mereka mendasarkannya pada suatu analisis “dialektika penerimaan pengeluaran pemerintah”. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan penerimaan dari pajak. Padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian besar. Mengacu pada teori pemungutan suara (*voting*), mereka berpendapat bahwa masyarakat mempunyai batas toleransi pajak, yakni suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala yang membatasi pemerintah untuk mengendalikan pungutan pajak secara tidak semena-mena atau sewenang-wenang.

Menurut *Peacock-Wiseman*, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat, yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Jadi, dalam keadaan normal, kenaikan pendapatan nasional meningkatkan pula baik penerimaan maupun pengeluaran pemerintah. Apabila keadaan normal tadi terganggu, katakanlah karena perang atau eksternalitas lain, maka pemerintah

terpaksa harus memperbesar pengeluarannya untuk mengatasi gangguan yang dimaksud. Konsekuensinya, timbul tuntutan untuk memperoleh penerimaan pajak lebih besar. Pungutan pajak yang lebih besar menyebabkan dana swasta untuk investasi dan modal kerja menjadi berkurang. Efek ini disebut efek penggantian (*displacement effect*). Postulat yang berkenaan dengan efek ini menyatakan, gangguan sosial dalam perekonomian menyebabkan aktivitas swasta digantikan oleh aktivitas pemerintah. Pengawasan gangguan acapkali tidak cukup dibiayai semata-mata dengan pajak, sehingga pemerintah mungkin harus juga meminjam dana luar negeri. Setelah gangguan teratasi, muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah pun kian membengkak karena kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut ialah pajak tidak turun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah usai.

Jika pada saat terjadinya gangguan sosial dalam perekonomian efek penggantian, maka sesudah gangguan berakhir timbul pula sebuah efek lain yang disebut efek inspeksi (*inspection effect*). Postulat efek ini menyatakan, gangguan sosial menimbulkan kesadaran masyarakat akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah sesudah redanya gangguan sosial tersebut. Kesadaran semacam itu menggugah kesediaan masyarakat untuk membayar pajak lebih besar, sehingga memungkinkan pemerintah beroleh penerimaan yang lebih besar pula. Inilah yang dimaksud dengan analisis dialektika penerimaan-pengeluaran pemerintah. Setelah mengetahui latar belakang intervensi pemerintah dalam perekonomian dan mengenal dasar teori pengeluarannya, kini marilah kita amati perkembangan pengeluaran pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir.

4.4. Variabel-Variabel Yang Berpengaruh Dalam Pengeluaran Daerah

4.4.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah suatu pendapatan untuk meningkatkan pembangunan daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Dalam melakukan pembangunan daerah diperlukan sumber-sumber dana yang pendapatannya untuk membiayai pengeluaran daerah yang digunakan untuk kelangsungan hidup daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dan usaha-usaha daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai pembangunan daerah.

Menurut pasal 79 Undang-undang N0. 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan, bahwa undang-undang tersebut menjelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelompokkan menjadi 4 yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah sendiri, yaitu terdiri dari :

a. Hasil pajak daerah

Adalah pungutan daerah yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri sebagai badan hukum publik tanpa memberikan prestasi kembali yang langsung ditunjuk.

b. Retnbusi daerah

Adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian jasa usaha atau milik pemerintah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.

c. Hasil perusahaan daerah

adalah penerimaan yang berasal dari perusahaan milik pemerintah daerah dengan prinsip pengelolaan berdasarkan ekonomi perusahaan tanpa meninggalkan asas publik dan sebagian keuntungan-keuntungan wajib disetor ke kas daerah.

d. Penerimaan dari dinas.

Penerimaan dari dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, misalnya pendapatan yang berasal dari dinas kesehatan, dinas pertanian, dan dinas perikanan DLL.

e. Penerimaan lain-lain

Penerimaan yang merupakan hasil dari usaha-usaha daerah selain tersebut diatas, seperti penerimaan dari dinas-dinas daerah dan penerimaan dari persewaan tanah, rumah, gedung, kendaraan milik pemerintah daerah, menerima cicilan kendaraan roda empat.

2. Dana perimbangan dan pinjaman daerah

Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Bagian daerah dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.
- b. Dana alokasi umum.
- c. Dana alokasi khusus.

3. Pinjaman daerah

- a. Pemerintah daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri atau luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintah dengan persetujuan DPRD.
- b. Pinjaman dari dalam negeri diberitahukan kepada pemerintah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Pinjaman dan sumber pinjaman yang berasal dari luar negeri, harus mendapatkan persetujuan pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4. Lain-lain pendapatan yang sah

Mengenai pendapatan lain-lain yang sah dapat ditegaskan bahwa yang termasuk golongan ini adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

4.4.2. PDRB per kapita

PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit produksi didalam suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. PDRB setiap tahun menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber alam yang dimiliki menjadi suatu proses produksi.

Perhitungan PDRB dapat didasarkan pada harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB berdasarkan pada harga berlaku merupakan jumlah dan seluruh nilai tambah bruto atau nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi pada periode tertentu (1 tahun) dan nilainya dipengaruhi oleh tingkat inflasi pada tahun yang bersangkutan.

PDRB berdasarkan pada harga konstan menggambarkan perubahan volume produksi, dimana perubahan harga yang terpengaruh oleh inflasi dihilangkan dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu, PDRB berdasarkan harga konstan dapat digunakan untuk melihat perubahan pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke tahun.

Pendapatan per kapita merupakan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama 1 tahun disuatu daerah atau wilayah dan dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di daerah tersebut. pendapatan per kapita diperoleh dengan membagi nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang berada di daerah tersebut dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Atau dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendapatan per kapitanya maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

4.4.3. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi dan dalam usaha untuk membangun suatu perekonomian, dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi penduduk memegang peran

penting karena ia menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk kegiatan ekonom. Sebagai akibat dari beberapa fungsinya ini, maka penduduk bukan saja merupakan salah satu faktor produksi, akan tetapi yang lebih penting lagi penduduk merupakan unsur yang menciptakan dan mengembangkan teknologi dan unsur yang mengorganisir menggunakan berbagai faktor produksi.

Pada umumnya ahli ekonom berpendapat bahwa perkembangan penduduk dapat menjadi suatu faktor pendorong maupun penghambat pembangunan ekonomi, ia dipandang sebagai faktor pendorong karena :

1. perkembangan ini memungkinkan pertambahan jumlah tenaga kerja dari masa ke masa, pertambahan penduduk dan pemberian pendidikan kepada mereka sebelum menjadi tenaga kerja sehingga suatu masyarakat dapat tenaga kerja yang terampil dan terdidik.
2. perluasan pasar, luas pasar barang-barang dan jasa-jasa ditentukan oleh dua faktor penting, pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk maka pasar akan bertambah dengan sendirinya.
3. dapat menciptakan dorongan untuk mengembangkan teknologi, perannya ini nyata kelihatan disektor pertanian. Perkembangan penduduk yang bertambah cepat bersama-sama dengan perbaikan dalam jaringan pengangkat dan pertambahan dalam tingkat pendapatan, secara terus-menerus telah memperluas hasil-hasil pertanian.

Disamping memberikan dampak positif pertambahan jumlah penduduk juga mengakibatkan dampak negatif. Akibat buruk akan ditimbulkan pertambahan jumlah penduduk terhadap pembangunan yang tercipta apabila produktivitas sektor produksi sangat rendah sekali dan dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran. Disamping menyebabkan pertambahan di daerah pedesaan, pertambahan penduduk dan tenaga kerja yang semakin cepat dan semakin besar disektor pertanian menimbulkan pula suatu masalah penting yang lain, yaitu pengaliran penduduk yang sangat berlebihan dari daerah-daerah pedesaan ke kota-kota besar. Migrasi dari desa ke kota ini bukan saja memperburuk masalah pengangguran dan under employment di kota-kota besar akan tetapi menimbulkan banyak masalah lainnya di daerah tersebut, seperti masalah kongesti/kesesakan, penyerobotan tanah dan pembangunan rumah liar, daerah perumahan yang kurang memadai dan sebagainya.

Pengaliran penduduk dari daerah-daerah pedesaan ke kota-kota besar tidak selalu akan menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan kepada pembangunan ekonomi. Dalam sejarah, proses tersebut memungkinkan kelebihan penduduk disektor pertanian memperoleh pekerjaan disektor lain. Dengan adanya kemungkinan ini maka penduduk yang harus tinggal disektor pertanian dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Hal ini melancarkan terciptanya usaha disektor pertama dengan menaikkan tingkat produktivitas. Di lain pihak, pembangunan ekonomi menimbulkan keperluan tenaga kerja yang lebih banyak di kota-kota besar yaitu sebagai pekerja, pimpinan perusahaan dan usahawan. Akan tetapi, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang menimbulkan

pengangguran yang tersembunyi di daerah pertama maka akan menyebabkan pendapatan rata-rata petani miskin menjadi rendah. Pada waktu yang sama, karena perbandingan diantara tanah dan penduduk telah menjadi bertambah kecil maka sewa tanah akan mengalami kenaikan. Ini akan mengalami pertambahan yang lebih banyak pada para petani kaya. Dan kekurangan kesempatan kerja di desa-desa menimbulkan arus urbanisasi ke kota-kota besar dan hal ini menimbulkan pertumbuhan kota yang lebih cepat. Oleh karenanya harga tanah, rumah dan sewa rumah berkembang dengan cepat dan menimbulkan pertambahan nilai kekayaan yang tinggi kepada para pemiliknya. Dan dengan terbatasnya kemampuan industri moderen untuk meningkatkan penciptaan kesempatan kerja menjadi lebih kecil dan menimbulkan kesulitan untuk meningkatkan.

4.5. Hipotesis Penelitian

1. Diduga PDRB per kapita berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap.
2. Diduga Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap.
3. Diduga jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Obyek Penelitian

Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan jumlah penduduk, terhadap pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap.

5.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan dokumen-dokumen dari peristiwa yang lalu di dapat dari sumber yang relevan.

5.3. Analisis Model PAM

Penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan model *Partial Adjustment Model* (PAM). Penggunaan model-model tersebut dimaksudkan untuk melihat bahwa spesifikasi model dinamik merupakan satu hal yang penting dalam pembentukan model ekonomi dan analisis yang menyertainya. Hal ini karena sebagian besar analisis ekonomi berkaitan erat dengan analisis runtut waktu (*time series*) yang sering diwujudkan oleh hubungan antara perubahan suatu besaran pengeluaran pemerintah dan kebijakan pemerintah di suatu saat dan pengaruhnya terhadap gejala perilaku kebijakan di saat yang lain. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah *Partial Adjustment Model* (PAM) Log linier, akan menunjukkan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Log} Y = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Log} X_1 + \alpha_2 \text{Log} X_2 + \alpha_3 \text{Log} X_3 + \text{Log} Y_{(-1)} + e_i$$

Dimana:

α_0 = Konstanta

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Koefisien regresi

Y = Pengeluaran pemerintah (Miliar Rupiah)

X_1 = Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)

X_2 = Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)

X_3 = Jumlah Penduduk (jiwa)

$Y_{(-1)}$ = Variabel kelambanan

e_i = Standar error

Dengan syarat koefisien kelambanan variabel tak bebas ($Y_{(-1)}$) terletak pada $0 < \alpha_4 < 1$ harus signifikan secara statistik. Selanjutnya, bila signifikan secara statistik maka dapat dihitung koefisien jangka panjangnya dengan rumus :

$$\text{Konstanta} = \alpha_0 / (1 - \alpha_4)$$

$$X_1 = \alpha_1 / (1 - \alpha_4)$$

$$X_2 = \alpha_2 / (1 - \alpha_4)$$

$$X_3 = \alpha_3 / (1 - \alpha_4)$$

5.3.1. Model yang Ditaksir

Spesifikasi penggunaan model dalam fungsi regresi ada dua yang sering digunakan dalam penelitian yaitu antara lain model linier dan model log linier. Dalam mengetahui perilaku data menunjukkan

hubungan linier atau log linier dalam penelitian ini digunakan metode formal yaitu melalui metode MWD (*Mac Kinnon, White dan Davidson*). (Agus Widarjono, 2005:94). Dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Estimasi menggunakan model :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

$$\ln Y = \gamma_0 + \gamma_1 \ln X_1 + \gamma_2 \ln X_2 + \gamma_3 \ln X_3 + v_i$$

Dan dapatkan residualnya (RES₁) dan (RES₂)

2. Nyatakan F₁ and F₂ sebagai predeksi yaitu langkahnya sebagai berikut

$$F_1 = Y - \text{RES}_1$$

$$F_2 = \ln - \text{RES}_2$$

3. Dapatkan nilai Z₁ = ln F₁ - F₂ dan Z₂ = antilog F₂ - F₁

4. Estimasi persamaan berikut

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 Z_1 + e_i$$

$$\ln Y = \gamma_0 + \gamma_1 \ln X_1 + \gamma_2 \ln X_2 + \gamma_3 \ln X_3 Z_2 + e_i$$

a. Jika Z₁ signifikan secara statistic melalui uji t maka kita menolak hipotesis nol bahwa model yang benar adalah linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nol bahwa model yang benar adalah linier.

b. Hipotesis nol bahwa model yang benar adalah log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nol bahwa model yang benar adalah log linier

5.4. Definisi Variabel

- 5.4.1. Pengeluaran pemerintah adalah Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam penelitian ini diambil dari sisi pengeluaran yang terdiri dari berbagai bidang pengeluaran yaitu terdiri dari dua bidang pengeluaran diantaranya pengeluaran rutin (*Operating Expenditures*) dan pengeluaran pembangunan (*Development Expenditures*) ini diambil dari realisasi pengeluaran pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap selama kurun waktu 15 tahun, yaitu mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 2004. Data Pengeluaran Pemerintah ini diperoleh dari data BPS Kabupaten Cilacap dari tahun 1990-2004.
- 5.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah semua unit produksi tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku dan harga konstan pada tahun tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data BPS Kabupaten Cilacap dari tahun 1990-2004 dengan tahun dasar 2002.
- 5.4.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari berbagai bidang pendapatan yaitu diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik daerah, dan penerimaan lain-lain. Data Pendapatan Asli Daerah ini diperoleh dari data BPS Kabupaten Cilacap dari tahun 1990-2004.
- 5.4.4. Jumlah penduduk adalah total keseluruhan penduduk dalam periode waktu satu tahun di Kabupaten Cilacap. Data jumlah penduduk yang

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data BPS Kabupaten Cilacap dari tahun 1990-2004.

5.5. Uji Statistik

Pengujian hipotesis pertama sampai ketiga dilakukan uji pada masing-masing koefisien dengan uji t. Uji variabel secara bersama-sama dilakukan dengan uji F yang digunakan untuk menguji seluruh variabel bebas. Upaya untuk melihat seberapa besar variabel-variabel penjelas mampu menjelaskan variasi variabel yang dijelaskan, digunakan dengan koefisien determinasi (R^2). Secara lebih rinci, masing-masing uji akan diuraikan sebagai berikut:

5.5.1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu dengan menganggap variabel yang lain konstan. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

Pengujian satu sisi :

a. Menentukan hipotesis

Uji t ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \alpha_i \leq 0$ (tidak berpengaruh positif yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, bahkan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai koefisien variabel bebas sama dengan nol).

$H_1 : \alpha_i > 0$ (ada pengaruh positif yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen).

b. Mencari t_{hitung}

Nilai t_{hitung} dapat diformulasikan seperti berikut ini (Gujarati, 2003;129) :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{SE(\beta_i)}$$

Di mana :

β_i = Koefisien regresi

$SE(\beta_i)$ = Standar error β_i

c. Mencari t tabel dengan pengujian satu sisi

Degree of freedom (df) = n-k, dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel baik dependen maupun independen.

Taraf signifikansi (α) pada penelitian ini sebesar 5%.

d. Menentukan kriteria pengujian:

Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti H_0 ditolak dan H_a tidak ditolak. Artinya ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara statistik. Sebaliknya, bila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, berarti H_0 tidak ditolak dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara statistik.

5.5.2. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh seluruh variabel-variabel dan secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah pengujian uji F sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis

Uji F ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (tidak ada pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen).

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ (ada pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen).

b. Mencari F_{hitung}

Nilai F_{hitung} dapat diformulasikan seperti berikut ini:

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (N - k)}$$

Dimana :

R^2 = koefisien determinasi

N = Banyaknya sampel (observasi)

K = Banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta

c. Mencari F_{tabel} dengan *degree of freedom* (df) = (k-1) sebagai *denominator* dan (n-k) sebagai *numerator*, dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel baik dependen maupun independen. Taraf signifikansi yang digunakan (α) 5%.

d. Menentukan kriteria pengujian:

Bila $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel-variabel independen tidak mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel-variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

5.6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel dengan mencocokkan penyebaran datanya. Pengembangan dalam penaksiran OLS selanjutnya akan digunakan metode R^2 . Metode yang selanjutnya akan digunakan dalam penaksiran OLS menjelaskan seberapa besar proporsi perubahan atau variasi dan variabel dependen sebagai akibat adanya perubahan dan variabel-variabel bebas.

5.6.1. Uji Asumsi Klasik

Langkah pengujian terhadap pelanggaran asumsi klasik atau uji asumsi klasik digunakan untuk menjelaskan adanya suatu fenomena ekonomi secara lebih akurat, yaitu dengan memperhatikan adanya kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap asumsi klasik. Adapun urutan atau tahapan dalam uji asumsi klasik adalah autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas.

5.6.2. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu keadaan dimana variabel pengganggu pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pengganggu pada periode lain. Autokorelasi disebabkan antara lain oleh faktor-faktor kelambanan (*inersia*), kesalahan dalam pembentukan model (bias spesification), adanya fenomena sarang laba-laba, penggunaan lag pada model, tidak

memasukkan variabel yang penting serta ada manipulasi data. Jika data model mengandung autokorelasi, maka akibatnya parameter yang diestimasi akan bias dan variansnya tidak minimum. Deteksi asumsi autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*.

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam uji ini sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis:

H_0 : model regresi yang diestimasi tidak terkena autokorelasi

H_a : model regresi yang diestimasi terkena autokorelasi.

b. Melakukan estimasi dengan model sebagai berikut:

$$\text{Resid} = \eta_0 + \eta_1 X_1 + \eta_2 X_2 + \eta_3 X_3 + \eta_4 Y_{(-1)} + \eta_5 \text{Resid}_{(-1)} + \eta_6 \text{Resid}_{(-2)} + \mu_i$$

Dimana:

Resid = nilai *residual* yang diperoleh dari regresi terbaik setelah uji MWD

$\text{Resid}_{(-1)}$ = *residual lag 1*

$\text{Resid}_{(-2)}$ = *residual lag 2*.

c. Dengan menggunakan taraf signifikansi (α) = 5 % dan derajat

kebebasan (df) 2 maka diperoleh nilai χ^2 tabel sebesar 5.991.

d. Kriteria pengujian:

H_0 diterima apabila $\chi^2 \text{ test } (\text{Obs} * R^2) \leq \chi^2 \text{ tabel}$.

H_0 ditolak apabila $\chi^2 \text{ test } (\text{Obs} * R^2) > \chi^2 \text{ tabel}$.

5.6.3. Uji Heteroskedastisitas

Homoskedastisitas adalah situasi dimana varians (σ^2) dari faktor pengganggu atau *disturbance term* adalah sama untuk semua observasi x . Penyimpangan terhadap asumsi ini disebut heteroskedastisitas yaitu apabila nilai varians (σ^2) variabel tak bebas (Y_i) meningkat sebagai akibat dan meningkatnya varians dari variabel bebas (X_i) maka varians dan Y_i tidak sama. Pendeteksian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode White.

Langkah uji White sebagai berikut:

1. Estimasi persamaan dan dapatkan residualnya (e_i)
2. Lakukan regresi pada persamaan berikut yang disebut regresi auxiliary:

- Regresi auxiliary tanpa perkalian antar variabel independen (*no cross terms*)

$$e_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{1i}^2 + \alpha_4 X_{2i}^2 + v_i$$

- Regresi auxiliary dengan perkalian antar variabel independen (*cross terms*)

$$e_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{1i}^2 + \alpha_4 X_{2i}^2 + \alpha_5 X_{1i} X_{2i} + v_i$$

dimana e_i^2 merupakan residual kuadrat yang kita peroleh dari persamaan.

3. Uji White didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan dengan R^2 yang akan mengikuti distribusi Chi-squares dengan degree of freedom sebanyak variabel independen tidak termasuk konstanta

dalam regresi auxiliary. Nilai hitung statistik chi-square (χ^2) dapat dicari dengan formula sebagai berikut:

$$n R^2 \approx \chi^2_{df}$$

4. jika nilai chi-square hitung ($n.R^2$) lebih besar dari nilai χ^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-square hitung lebih kecil dari nilai χ^2 kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam deteksi heteroskedastisitas dengan Uji White sebagai berikut:

- a. Menentukan hipotesis:

H_0 : model regresi yang diestimasi tidak terkena heteroskedastisitas

H_a : model regresi yang diestimasi terkena heteroskedastisitas

- b. Kriteria pengujian:

Jika $obs * R^2 (\chi^2 test) < \chi^2$ tabel dengan df (9) maka H_0 yang menyatakan model yang digunakan terbebas masalah heteroskedastisitas diterima.

Jika $obs * R^2 (\chi^2 test) > \chi^2$ tabel dengan df (9) maka H_0 yang menyatakan model yang digunakan terbebas masalah heteroskedastisitas ditolak. Penggunaan df (9) didasarkan pada banyaknya variabel yang digunakan dalam uji ini.

5.6.4. Uji Multikolinieritas

Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah tidak adanya multikolinieritas sempurna (*no perfect multicollinearity*). Suatu model

regresi dikatakan terkena multikolinieritas apabila terjadi hubungan linier yang *perfect* atau *exact* di antara beberapa atau semua variabel bebas. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas.

Jika terjadi multikolinieritas sempurna maka koefisien regresi dari variabel bebas adalah tidak dapat ditentukan (*underterminate*) dan kesalahan baku (*standard error*) dari variabel bebas menjadi tak terhingga (*infinite*). Apabila terjadi multikolinieritas tidak sempurna maka koefisien regresi dari variabel bebas meskipun dapat ditentukan, namun kesalahan baku dari variabel bebas sangat besar yang berarti koefisien dari variabel bebas tidak dapat diestimasi dengan tingkat ketepatan yang akurat.

Beberapa kaidah untuk mendeteksi adanya multikolinieritas :

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan dari model estimasi sangat tinggi tetapi tingkat signifikan variabel bebas berdasarkan uji t statistik kecil atau bahkan tidak ada yang signifikan (*high R^2 but few significant t ratios*).
- b. Cara lain untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat korelasi antara variabel bebas (*high pair-wise correlation among regressors*) bila koefisien korelasinya $> 0,8$ maka diduga ada multikolinier.

c. Menggunakan korelasi parsial (*examination of partial correlation*).

Rule of thumb yang digunakan adalah apabila R^2 model utama lebih besar dan R^2 dimana variabel bebas diubah menjadi variabel tak bebas maka dalam model empiris tidak ditemukan adanya multikolinieritas.

Bila terdapat multikolinieritas maka dapat dilakukan perbaikan dengan berbagai cara di antaranya dengan kombinasi transformasi variabel dan apriori informasi.



BAB VI
ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data dari model penelitian ini dilakukan dengan model dinamik dengan pendekatan metode *Partial Adjustment Model* (PAM) untuk memperoleh estimasi dalam jangka panjang yang diselesaikan dengan dukungan program Eviews versi 4. Hasil-hasil pengolahan data yang disajikan di sini dianggap merupakan hasil estimasi terbaik karena dapat memenuhi kriteria teori ekonomi, statistik maupun ekonometri. Hasil estimasi ini diharapkan mampu menjawab hipotesis yang diajukan. Adapun spesifikasi model yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Adjustment Model* (PAM) adalah sebagai berikut:

$$\text{LogY} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LogX}_1 + \alpha_2 \text{LogX}_2 + \alpha_3 \text{LogX}_3 + \text{LogY}_{(-1)} + e_i$$

Dimana:

α_0 = Konstanta

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Koefisien regresi

Y = Pengeluaran pemerintah (Miliar Rupiah)

X_1 = Produk Domestik Regional Bruto (Miliar Rupiah)

X_2 = Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)

X_3 = Jumlah Penduduk (jiwa)

$Y_{(-1)}$ = Variabel kelambanan

e_i = Standar error

6.1. Pemilihan Model Regresi

Perhitungan dengan menggunakan metode MWD dengan bantuan komputer diperoleh hasil :

Tabel 6.1
Hasil Uji MWD Linier

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.45E+09	8.41E+08	1.720702	0.1160
X1perkp	38676814	33992928	1.137790	0.2817
X2	1.208118	0.186414	6.480830	0.0001
X3	-981.0423	568.0484	-1.727040	0.1149
Z1	-1.01E+08	71162087	-1.424778	0.1847

Sumber : Hasil data diolah

Nilai t hitung koefisien $Z_1 = -1.424778$ sedangkan nilai kritis table t pada $\alpha = 5\%$ dengan df 14 adalah 1.761. Dengan demikian variabel Z_1 adalah tidak signifikan secara statistik melalui uji t sehingga harus menerima hipotesis nol bahwa yang benar adalah log linier.

Tabel 6.2
Hasil Uji MWD Log Linier

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-85.28075	38.34769	-2.223882	0.0504
LOG(X1perkp)	-0.038132	0.035323	-1.079515	0.3057
LOG(X2)	0.711486	0.130135	5.467273	0.0003
LOG(X3)	6.334352	2.846191	2.225554	0.0502
Z2	-1.08E-08	3.00E-09	-3.588198	0.0049

Sumber : Hasil data diolah

Nilai t hitung koefisien $Z_2 = -3.588198$ sedangkan nilai kritis tabel t pada $\alpha = 5\%$ dengan df 14 adalah 1.761. Dengan demikian variabel Z_2 adalah signifikan secara statistik melalui uji t sehingga harus menerima hipotesis alternative bahwa model yang benar adalah linier.

Kesimpulanya berdasarkan hasil regresi linier maupun log linier sama baiknya dalam menjelaskan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap.

6.2. Hasil Estimasi Regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh estimasi yang dituangkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.3 Hasil Estimasi dengan Variabel Dependen LogY

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.69913	21.81179	1.407456	0.1929
LOG(X1perkp)	0.011231	0.036053	0.311507	0.7625
LOG(X2)	0.884448	0.099875	8.855553	0.0000
LOG(X3)	-2.296127	1.597322	-1.437485	0.1844
LOG(Y(-1))	0.233788	0.073570	3.177753	0.0112
R-squared	0.997646	F-statistic		953.5480
Durbin-Watson stat	1.803486	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Hasil data diolah

Berdasarkan tabel di atas, secara matematis persamaan regresi tersebut merupakan estimasi jangka pendek dapat dituliskan sebagai berikut ini :

$$\text{LogY} = 30.699 + 0.0112 \text{ LogX}_1 + 0.8844 \text{ LogX}_2 - 2.296 \text{ LogX}_3 + 0.233 \text{ LogY}_{(-1)}$$

Koefien jangka panjang = koefiesn jangka pendek : $\delta = (1 - \text{koefien penyesuaian})$

Koefisen penyesuaian sebesar $\delta = 1 - 0.233788 = 0.766212$. Sehingga diperoleh persamaan jangka panjangnya sebagai berikut :

$$\text{LogY} = 40.066 + 0.0146 \text{ LogX}_1 + 1.154 \text{ LogX}_2 - 2.996 \text{ LogX}_3$$

6.3. Uji Statistik.

Sub bab dalam bagian ini meliputi uji statistik secara bersama-sama melalui besarnya F_{hitung} , uji statistik secara individu pada setiap koefisien variabel independen melalui besarnya t_{hitung} yang diperoleh. Selanjutnya, besarnya variasi variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen diukur dengan koefisien determinasi yang diperoleh (R^2).

6.3.1. Uji F

Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh nilai sebesar 953.5480 sedangkan F_{tabel} (5%) sebesar 3,84. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel-variabel independen yakni PDRB per kapita, PAD dan jumlah penduduk yang digunakan dalam studi ini berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pengeluaran pemerintah daerah.

6.3.2. Uji t

Uji ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Berkaitan dengan hipotesis yang diajukan dalam studi ini menggunakan uji satu sisi positif. Adapun kriteria yang digunakan adalah apabila nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan bila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan (α) yang digunakan sebesar 5%. Hasil estimasi yang telah dilakukan berkaitan dengan uji ini adalah sebagai berikut:

6.3.2.1. Pengujian terhadap parameter X_1 (PDRB per kapita)

1) Menentukan hipotesis:

$H_0 : \alpha_1 \leq 0$ Artinya, $\text{Log}X_1$ tidak berpengaruh terhadap $\text{Log}Y$, bahkan tidak berpengaruh apabila nilai koefisien variabel $\text{Log}X_1$ sama dengan nol.

$H_a : \alpha_1 > 0$ Artinya, $\text{Log}X_1$ berpengaruh terhadap $\text{Log}Y$.

2) Dengan menggunakan taraf signifikansi (α) = 5%, pengujian satu sisi diperoleh t_{tabel} sebesar 1.761

3) Kriteria pengujian:

H_0 diterima apabila $t_{hitung} \leq 1.761$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > 1.761$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh t_{hitung} 0.311507

4) Hasil Uji:

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi dengan program *evIEWS* dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Artinya dengan taraf nyata sebesar 5% ternyata hipotesis pertama yaitu PDRB tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran pemerintah terbukti, karena dari sembilan sektor yang berperan dalam pembentukan PDRB per kapita Kabupaten Cilacap sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan. Ini berarti sektor pertanian memiliki peran yang besar dalam menciptakan perekonomian Kabupaten Cilacap dibanding dengan sektor-sektor yang lain, hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk tidak sebanding dengan tingkat PDRB.

6.3.2.2. Pengujian terhadap parameter X2 (PAD)

1) Menentukan hipotesis:

$H_0 : \alpha_2 \leq 0$ Artinya, LogX2 tidak berpengaruh positif terhadap LogY, bahkan tidak berpengaruh apabila nilai koefisien variabel LogX2 sama dengan nol.

$H_a : \alpha_2 > 0$ Artinya, LogX2 berpengaruh positif terhadap LogY.

Dengan menggunakan taraf signifikansi (α) 5%, pengujian satu sisi diperoleh t tabel sebesar 1.761

2) Kriteria pengujian:

H_0 diterima apabila $t_{hitung} \leq 1.761$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > 1.761$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh $t_{hitung} = 8.85553$.

3) Hasil Uji:

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi dengan program *eviews* dapat diketahui bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$. Artinya dengan taraf nyata sebesar 5% ternyata hipotesis kedua yaitu PAD berpengaruh positif terhadap Pengeluaran pemerintah terbukti.

6.3.2.3. Pengujian terhadap parameter X3 (Jumlah Penduduk)

1) Menentukan hipotesis:

$H_0 : \alpha_3 \leq 0$ Artinya, X₃ tidak berpengaruh positif terhadap LogY, bahkan tidak berpengaruh apabila nilai koefisien variabel X₃ sama dengan nol.

$H_a : \alpha_3 > 0$ Artinya, X₃ berpengaruh positif terhadap LogY.

2) Dengan menggunakan taraf signifikansi (α) = 5%, pengujian satu sisi diperoleh $t_{\text{tabel}} = 1.761$

3) Kriteria pengujian:

H_0 diterima apabila $t_{\text{hitung}} \leq 1.761$

H_0 ditolak apabila $t_{\text{hitung}} > 1.761$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh $t_{\text{hitung}} = -1.437485$.

4) Hasil Uji:

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi dengan program eviews dapat diketahui bahwa nilai $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$. Artinya dengan taraf nyata sebesar 5% ternyata hipotesis ketiga yaitu jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap Pengeluaran pemerintah, karena rendahnya PDRB tidak sebanding dengan tingginya jumlah penduduk. Sebagai mana tercantum pada tabel 6.4.

6.3.3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel dependen mampu menerangkan variasi dari variabel independen. Dengan kata lain koefisien determinasi menunjukkan ketetapan dan suatu analisis regresi. Besaran koefisien ini berkisar dari 0 sampai dengan 1. Bila besarnya mendekati 0 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya bila mendekati 1 maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Besarnya koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0.997646. Artinya, besarnya variasi dari variabel Pengeluaran pemerintah daerah mampu

dijelaskan oleh hasil uji PDRB per kapita, PAD dan jumlah penduduk sebesar 99% sedangkan variabel yang tak diestimasi sebagai variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 1%.

6.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diterapkan guna memperoleh hasil estimasi yang valid secara ekonometri, sehingga analisis yang akan diterapkan menjadi lebih sah dan diharapkan tidak menyimpang dari teori ekonomi. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan dalam studi ini meliputi uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas.

6.4.1. Uji Autokorelasi

Salah satu asumsi dalam model regresi linier adalah tidak terjadinya autokorelasi. Autokorelasi dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat korelasi antara serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang (*time series* atau *cross sectional*).

Untuk menguji adanya autokorelasi dapat digunakan metode *Breusch-Godfrey* yang dikenal telah mengembangkan metode uji *Lagrange Multiplier* (LM). Hipotesis nol yang dibuat adalah tidak adanya autokorelasi, jika kita menolak hipotesis nol maka ada ditemukannya autokorelasi. Ada tidak nya masalah autokorelasi bisa diketahui dari melihat probabilitas p nya, yaitu jika lebih kecil dari alpha maka ditemukannya autokorelasi dan menolak hipotesis nol begitu juga sebaliknya (Agus W, 2005, 186).

Tabel.6.4. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	0.020761	Probability	0.979513
Obs*R-squared	0.082553	Probability	0.959564

Dari hasil perhitungan untuk uji autokorelasi didapatkan probabilitas ρ nya 0.979513 dan 0.959564 yaitu > dari alpha 0.05 dan *chi-squares* hitung 0.082553 lebih kecil dari *chi-squares* kritis α 0.05 atau 5% adalah 5.99147 maka dapat dikatakan bahwa lolos dari masalah autokorelasi sehingga dapat menerima hipotesis nol yaitu tidak ada masalah autokorelasi.

6.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel.6.5. Uji Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	0.585707	Probability	0.750319
Obs*R-squared	5.683127	Probability	0.577197

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas maka dapat digunakan metode uji White. Hipotesis nol dalam uji ini adalah tidak adanya heteroskedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas melalui nilai probabilitas *Chi squares* atau pada probabilitas ρ nya, jika lebih kecil dari alpha maka ditemukannya heteroskedastisitas dan menolak hipotesis nol begitu juga sebaliknya. Dalam perhitungan ini ditemukan bahwa nilai hasil dari probabilitas ρ nya adalah sebesar 0.577197 dan 0.750319 yaitu > alpha 0.05 dan *chi-squares* hitung 5.683127 lebih kecil dari *chi-squares* kritis pada α 0.05 dengan df sebesar 14.0671 maka dapat dikatakan bahwa bebas dari masalah heterokedastisitas dan hipotesis nol dapat diterima. (Agus W, 2005, 186)

6.4.3. Uji Multikolinieritas

Deteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai R^2 , F statistik, serta t statistik. Uji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan

metode Klein di mana salah satu variabel independen pada model awal yang diestimasi digunakan sebagai variabel dependen kemudian R^2 yang diperoleh dibandingkan dengan R^2 yang dihasilkan pada estimasi model awal. Tabel berikut menunjukkan hasil estimasi yang digunakan sebagai uji multikolinieritas dalam studi ini.

Tabel.6.6. Hasil Perbandingan R^2 Metode Klien sebagai Uji Multikolinieritas

Fungsi	R^2 Utama	R^2 Parsial	Keterangan
$\text{LogY} = f(\text{LogX}_1, \text{LogX}_2, \text{LogX}_3, \text{LogY}_{(-1)})$	0.997646	-	-
$\text{LogX}_1 = f(\text{LogX}_2, \text{LogX}_3, \text{LogY}_{(-1)})$	-	0.668335	Bebas Multikolinieritas
$\text{LogX}_2 = f(\text{LogX}_1, \text{LogX}_3, \text{LogY}_{(-1)})$	-	0.971400	Bebas Multikolinieritas
$\text{LogX}_3 = f(\text{LogX}_1, \text{LogX}_2, \text{LogY}_{(-1)})$	-	0.927176	Bebas Multikolinieritas
$\text{LogY}_{(-1)} = f(\text{LogX}_1, \text{LogX}_2, \text{LogX}_3)$	-	0.950836	Bebas Multikolinieritas

Tabel 6.6 di atas menunjukkan bahwa R^2 parsial lebih kecil daripada R^2 utama sehingga model penelitian yang diestimasi dalam penelitian ini tidak menyimpang dari asumsi klasik, yakni multikolinieritas. Artinya, model ini tidak memiliki korelasi yang kuat antar variabel independen yang digunakan.

6.5. Interpretasi Ekonomi

Bagian ini merupakan penjelasan yang berkaitan dengan arah tanda maupun besaran (*magnitude*) koefisien hasil regresi dan tingkat signifikansi secara statistik dari variabel-variabel independen yang digunakan secara individu. Interpretasi pada hubungan setiap variabel independen terhadap variabel dependen dalam jangka panjang.

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa rata-rata besarnya pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam jangka pendek sebesar 30.699%, sedangkan dalam jangka panjang sebesar 40.066 % dengan asumsi variabel-variabel independen yang digunakan dalam studi ini adalah nol. Besaran nilai tersebut dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap karena

pemerintah daerah harus membiayai pengeluaran daerah yang bersifat tetap seperti pemeliharaan sarana fisik yang disediakan pemerintah daerah kabupaten Cilacap untuk masyarakat.

Variabel PDRB Perkapita menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Koefisien variabel tersebut yang dihasilkan sebesar 0.014 untuk jangka pendek dan 0.019 untuk jangka panjang dengan arah positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PDRB Perkapita tidak akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah.

Variabel PAD berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Koefisien variabel tersebut yang dihasilkan sebesar 0.8844 untuk jangka pendek dan 1.154 untuk persamaan jangka panjang dengan arah positif. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kenaikan PAD akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah. Tepatnya, setiap kenaikan 1% PAD rata-rata akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah sebesar 0.8844 % untuk jangka pendek dan 1.154 % dalam jangka panjang. Keadaan tersebut terjadi karena pengeluaran pemerintah daerah akan tergantung pada besarnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah setempat. Adapun komponen-komponen pendapatan daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah hasil pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain. Tingginya pendapatan daerah pada gilirannya akan diikuti oleh tingkat pengeluaran pemerintah yang tinggi.

Variabel jumlah penduduk menunjukkan hasil bahwa variabel tersebut tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Koefisien variabel tersebut yang dihasilkan sebesar -2.296 untuk jangka pendek dan -2.996 untuk jangka panjang dengan arah negatif.



BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bagian akhir dari studi ini berisi dengan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan studi ini. Penarikan kesimpulan didasarkan pada tujuan dari adanya penelitian ini sedangkan saran yang diberikan oleh penulis ditujukan pada instansi atau lembaga bahkan masyarakat yang terkait dalam penelitian ini sehingga minimal merupakan salah satu manfaat yang hendak dicapai peneliti dapat terwujud.

7.1. Kesimpulan

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara statistik variabel PDRB (X_1) tidak berpengaruh terhadap Pengeluaran pemerintah (Y). Hal itu berarti bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang peningkatan PDRB tidak akan menaikkan Pengeluaran pemerintah. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah penduduk tidak sebanding dengan pertumbuhan PDRB.
2. Hipotesis kedua yakni variabel PAD (X_2) berpengaruh terhadap Pengeluaran pemerintah (Y) kabupaten Cilacap dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan arah positif. Hal itu berarti, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kenaikan PAD akan meningkatkan Pengeluaran pemerintah mampu dibuktikan. Keadaan tersebut terjadi karena pengeluaran pemerintah daerah akan tergantung besarnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah setempat. Tingginya pendapatan daerah

yang selanjutnya disebut PAD pada gilirannya akan diikuti oleh tingkat pengeluaran yang tinggi.

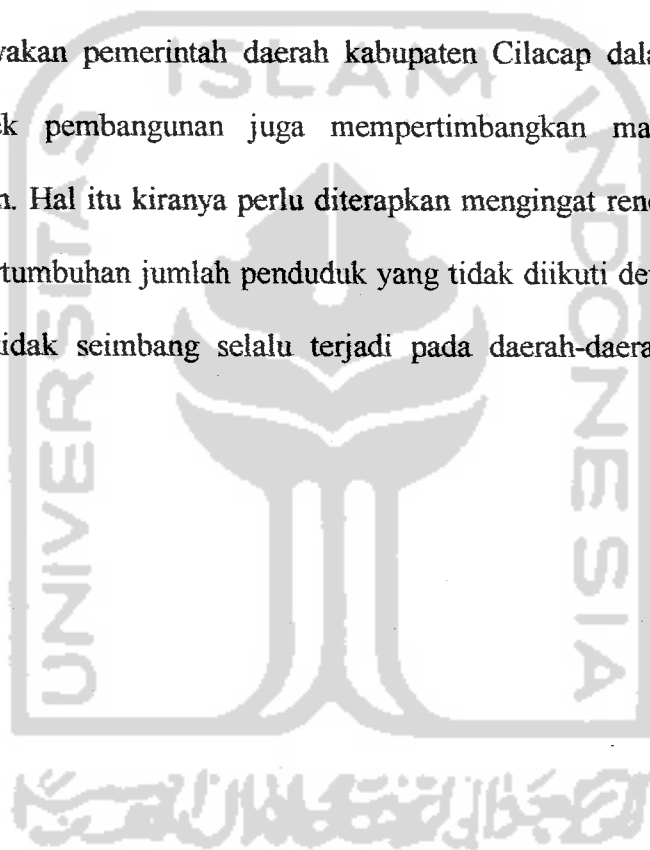
3. Secara statistik menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah dalam jangka panjang dengan arah negatif. Hasil tersebut tidak mampu membuktikan hipotesis ketiga yakni besarnya jumlah penduduk akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Hal itu karena dalam jangka panjang, kurangnya pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi demikian karena banyak penduduk yang bekerja di luar Kabupaten Cilacap. Kondisi demikian disebabkan karena rendahnya PDRB tidak sebanding dengan tingginya jumlah penduduk.

7.2. Implikasi

Berkaitan dengan hasil studi ini yang menunjukkan bahwa ketiga variabel yang diamati yakni PDRB perkapita dan jumlah penduduk tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, kecuali PAD mempengaruhi pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap. Maka hendaknya pemerintah daerah dalam menetapkan besarnya pengeluaran pemerintah baik yang digunakan untuk pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin, mempertimbangkan besarnya PAD, demikian pula perlu diperhatikan tingkat PDRB perkapita dan kesejahteraan penduduk dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga PDRB perkapita dan jumlah penduduk dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah Kabupaten Cilacap.

Upaya untuk meningkatkan PAD yang pada gilirannya akan meningkatkan pengeluaran pemerintah maka hendaknya pemerintah daerah Kabupaten Cilacap lebih efisien dalam memungut pajak daerah seperti pajak Bumi dan Bangunan serta retribusi. Diupayakan biaya pemungutan pajak lebih rendah daripada penerimaan pajak.

Diupayakan pemerintah daerah kabupaten Cilacap dalam merealisasikan proyek-proyek pembangunan juga mempertimbangkan masalah pemerataan pembangunan. Hal itu kiranya perlu diterapkan mengingat rendahnya PDRB dan tingginya pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan pertumbuhan PAD yang tidak seimbang selalu terjadi pada daerah-daerah tertentu seperti perkotaan.



Daftar Pustaka

- Agus Widarjono (2005), *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Abdul Halim (2003), "Analisis Pengaruh Pengeluaran Rutin Dan Pengeluaran Pembangunan Terhadap PDRB Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara Tahun 1991-2001", *Tesis* Program Pasca Sarjana, Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Andri Susanto (2004), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Daerah Dalam APBD Di Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 1983-2002", *Skripsi* Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- BPS, *Cilacap Dalam Angka*, berbagai edisi.
- Kunarjo, (1996), *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Edisi Ke-3, Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta.
- Kuncoro, H, (2000), Ekspansi Pengeluaran Pemerintah Dan Responsitas Sektor Swasta, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5, No. 1, 53-63.
- Lincoln Arsyad, (1999), *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi 1, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2002), *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.



LAMPIRAN 1

Data Mentah

obs	Y	X1PERK	X2	X3
1990	12089613	0.754240	12196097	1455877.
1991	17123038	0.839808	17520035	1499401.
1992	21196661	0.975565	21746654	1509334.
1993	25113407	1.041171	25594341	1516747.
1994	28808865	1.223571	30023032	1537158.
1995	34934623	0.143498	37291883	1550283.
1996	42599246	1.617708	45989839	1617772.
1997	66133132	1.818586	70527855	1633952.
1998	1.12E+08	3.002326	1.23E+08	1642725.
1999	1.69E+08	3.433498	1.83E+08	1652019.
2000	1.56E+08	3.894289	1.64E+08	1671779.
2001	3.53E+08	4.337962	3.91E+08	1689214.
2002	4.37E+08	4.911009	4.37E+08	1696765.
2003	6.43E+08	5.304203	4.98E+08	1704596.
2004	6.16E+08	5.827176	4.91E+08	1709908.

LAMPIRAN II

Data Diolah

obs	LOG(Y)	LOG(X1PERK)	LOG(X2)	LOG(X3)
1990	16.30786	-0.282045	16.31663	14.19112
1991	16.65594	-0.174582	16.67886	14.22058
1992	16.86935	-0.024738	16.89497	14.22718
1993	17.03891	0.040346	17.05788	14.23208
1994	17.17619	0.201774	17.21748	14.24545
1995	17.36899	-1.941437	17.43429	14.25395
1996	17.56735	0.481010	17.64393	14.29656
1997	18.00718	0.598059	18.07152	14.30651
1998	18.53393	1.099387	18.62442	14.31187
1999	18.94661	1.233580	19.02312	14.31751
2000	18.86433	1.359511	18.91808	14.32940
2001	19.68072	1.467405	19.78424	14.33977
2002	19.89630	1.591479	19.89630	14.34423
2003	20.28145	1.668500	20.02659	14.34884
2004	20.23900	1.762532	20.01134	14.35195

LAMPIRAN III

Hasil Uji MWD Model Linier

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 09/07/07 Time: 21:54
 Sample: 1990 2004
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.45E+09	8.41E+08	1.720702	0.1160
X1PERK	38676814	33992928	1.137790	0.2817
X2	1.208118	0.186414	6.480830	0.0001
X3	-981.0423	568.0484	-1.727040	0.1149
Z1	-1.01E+08	71162087	-1.424778	0.1847
R-squared	0.975227	Mean dependent var	1.82E+08	
Adjusted R-squared	0.965318	S.D. dependent var	2.21E+08	
S.E. of regression	41206333	Akaike info criterion	38.16728	
Sum squared resid	1.70E+16	Schwarz criterion	38.40330	
Log likelihood	-281.2546	F-statistic	98.41784	
Durbin-Watson stat	1.599203	Prob(F-statistic)	0.000000	

LAMPIRAN IV

Hasil Uji MWD Logaritma

Dependent Variable: LOG(Y)
 Method: Least Squares
 Date: 09/07/07 Time: 22:17
 Sample: 1990 2004
 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-85.28075	38.34769	-2.223882	0.0504
LOG(X1PERK)	-0.038132	0.035323	-1.079515	0.3057
LOG(X2)	0.711486	0.130135	5.467273	0.0003
LOG(X3)	6.334352	2.846191	2.225554	0.0502
Z2	-1.08E-08	3.00E-09	-3.588198	0.0049
R-squared	0.998148	Mean dependent var	18.22894	
Adjusted R-squared	0.997407	S.D. dependent var	1.360591	
S.E. of regression	0.069286	Akaike info criterion	-2.239958	
Sum squared resid	0.048005	Schwarz criterion	-2.003941	
Log likelihood	21.79968	F-statistic	1347.200	
Durbin-Watson stat	1.489140	Prob(F-statistic)	0.000000	

LAMPIRAN V

Hasil Estimasi Regresi

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Date: 09/07/07 Time: 22:25

Sample(adjusted): 1991 2004

Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	30.69913	21.81179	1.407456	0.1929
LOG(X1PERK)	0.011231	0.036053	0.311507	0.7625
LOG(X2)	0.884448	0.099875	8.855553	0.0000
LOG(X3)	-2.296127	1.597322	-1.437485	0.1844
LOG(Y(-1))	0.233788	0.073570	3.177753	0.0112
R-squared	0.997646	Mean dependent var		18.36616
Adjusted R-squared	0.996600	S.D. dependent var		1.299785
S.E. of regression	0.075793	Akaike info criterion		-2.049164
Sum squared resid	0.051701	Schwarz criterion		-1.820929
Log likelihood	19.34415	F-statistic		953.5480
Durbin-Watson stat	1.803486	Prob(F-statistic)		0.000000

LAMPIRAN VI

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.020761	Probability	0.979513
Obs*R-squared	0.082553	Probability	0.959564

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 09/17/07 Time: 01:08

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.261013	24.70694	0.010564	0.9919
LOG(X1PERK)	-0.001250	0.042425	-0.029472	0.9773
LOG(X2)	0.010244	0.123721	0.082798	0.9363
LOG(X3)	-0.020677	1.809087	-0.011429	0.9912
LOG(Y(-1))	-0.008455	0.093745	-0.090197	0.9307
RESID(-1)	0.085832	0.432686	0.198370	0.8484
RESID(-2)	-0.020436	0.644343	-0.031716	0.9756
R-squared	0.005897	Mean dependent var		-3.90E-15
Adjusted R-squared	-0.846192	S.D. dependent var		0.063064
S.E. of regression	0.085688	Akaike info criterion		-1.769364
Sum squared resid	0.051397	Schwarz criterion		-1.449835
Log likelihood	19.38555	F-statistic		0.006920
Durbin-Watson stat	1.937371	Prob(F-statistic)		0.999997

LAMPIRAN VII

Hasil Uji Heteroskedastisitas

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.585707	Probability	0.750319
Obs*R-squared	5.683127	Probability	0.577197

Test Equation:

Dependent Variable: RESID²

Method: Least Squares

Date: 09/17/07 Time: 01:17

Sample: 1991 2004

Included observations: 14

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.382286	2.702432	-0.511497	0.6273
LOG(X1PERK)	0.003094	0.014346	0.215671	0.8364
(LOG(X1PERK)) ²	0.001987	0.009550	0.208063	0.8421
LOG(X2)	-0.239949	0.283039	-0.847758	0.4291
(LOG(X2)) ²	0.006032	0.007225	0.834965	0.4357
LOG(X3)	0.150431	0.265456	0.566689	0.5915
LOG(Y(-1))	0.165132	0.205900	0.802003	0.4531
(LOG(Y(-1))) ²	-0.004236	0.005455	-0.776585	0.4669
R-squared	0.405938	Mean dependent var		0.003693
Adjusted R-squared	-0.287135	S.D. dependent var		0.006109
S.E. of regression	0.006930	Akaike info criterion		-6.810244
Sum squared resid	0.000288	Schwarz criterion		-6.445069
Log likelihood	55.67171	F-statistic		0.585707
Durbin-Watson stat	2.695088	Prob(F-statistic)		0.750319

LAMPIRAN VIII

Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil Uji LogX₁

Dependent Variable: LOG(X1PERK)

Method: Least Squares

Date: 09/17/07 Time: 01:39

Sample(adjusted): 1991 2004

Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-129.3127	186.8932	-0.691907	0.5047
LOG(X2)	0.280790	0.871507	0.322190	0.7539
LOG(X3)	8.667886	13.73960	0.630869	0.5423
LOG(Y(-1))	0.050669	0.645098	0.078545	0.9389
R-squared	0.668335	Mean dependent var		0.668773
Adjusted R-squared	0.568835	S.D. dependent var		1.012430
S.E. of regression	0.664793	Akaike info criterion		2.256275
Sum squared resid	4.419502	Schwarz criterion		2.438863
Log likelihood	-11.79393	F-statistic		6.716958
Durbin-Watson stat	2.104758	Prob(F-statistic)		0.009237

Hasil Uji LogX₂

Dependent Variable: LOG(X2)

Method: Least Squares

Date: 09/17/07 Time: 01:41

Sample(adjusted): 1991 2004

Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-131.2510	55.19760	-2.377838	0.0388
LOG(X1PERK)	0.036589	0.113565	0.322190	0.7539
LOG(X3)	9.738127	4.011877	2.427324	0.0356
LOG(Y(-1))	0.575063	0.145574	3.950306	0.0027
R-squared	0.971400	Mean dependent var		18.37736
Adjusted R-squared	0.962820	S.D. dependent var		1.244569
S.E. of regression	0.239979	Akaike info criterion		0.218426
Sum squared resid	0.575899	Schwarz criterion		0.401014
Log likelihood	2.471019	F-statistic		113.2170
Durbin-Watson stat	2.424410	Prob(F-statistic)		0.000000

Hasil Uji LogX₃

Dependent Variable: LOG(X3)

Method: Least Squares

Date: 09/17/07 Time: 01:42

Sample(adjusted): 1991 2004

Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.65148	0.101136	134.9820	0.0000
LOG(X1PERK)	0.004416	0.007000	0.630869	0.5423
LOG(X2)	0.038072	0.015685	2.427324	0.0356
LOG(Y(-1))	-0.003284	0.014528	-0.226035	0.8257
R-squared	0.927176	Mean dependent var	14.29471	
Adjusted R-squared	0.905329	S.D. dependent var	0.048767	
S.E. of regression	0.015005	Akaike info criterion	-5.325902	
Sum squared resid	0.002252	Schwarz criterion	-5.143315	
Log likelihood	41.28132	F-statistic	42.43929	
Durbin-Watson stat	0.883618	Prob(F-statistic)	0.000005	

Hasil Uji LogY₍₋₁₎

Dependent Variable: LOG(Y(-1))

Method: Least Squares

Date: 09/17/07 Time: 01:43

Sample(adjusted): 1991 2004

Included observations: 14 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	20.72851	93.52427	0.221638	0.8291
LOG(X1PERK)	0.012168	0.154920	0.078545	0.9389
LOG(X2)	1.059798	0.268282	3.950306	0.0027
LOG(X3)	-1.547955	6.848302	-0.226035	0.8257
R-squared	0.950836	Mean dependent var	18.08536	
Adjusted R-squared	0.936087	S.D. dependent var	1.288647	
S.E. of regression	0.325782	Akaike info criterion	0.829780	
Sum squared resid	1.061340	Schwarz criterion	1.012368	
Log likelihood	-1.808462	F-statistic	64.46762	
Durbin-Watson stat	1.923833	Prob(F-statistic)	0.000001	